

KEBIJAKAN LUAR NEGERI JOKOWI (2014 – 2019)

Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.

ISU-ISU PENTING

- Nawa Cita sebagai landasan kebijakan Jokowi baik *domestic policy* maupun *foreign policy*
- Deklarasi Poros Maritim Dunia (2014) dan implikasinya untuk kebijakan luar negeri RI khususnya di bidang maritime (perikanan)
- *International activism* SBY vs orientasi kepentingan domestik Jokowi (lebih selektif dan pragmatis) dan unsur *economic nationalism* (kewajiban pembangunan smelter dan divestasi 51% saham *Freeport MacMoran*)
- Fokus pada pembangunan infrastruktur dan dukungan internasional – kebijakan luar negeri memfasilitasi tercapainya prioritas kebijakan dalam negeri (*maritime connectivity*, pembangunan infrastruktur, industri perikanan, dan investasi).
- Diplomasi ekonomi (pembentukan *Comprehensive Economic Partnership* atau CEPA, contohnya dengan Australia)

- *Perlindungan TKI di luar negeri*
- *Inisiatif gagasan kerja sama Indo-Pasifik meskipun belum jelas kaitannya dengan kebijakan domestik*
- *Bantuan kemanusiaan untuk Rohingya*
- *Penekanan pada identitas Indonesia sebagai kekuatan moderat*
- *Menjaga jarak yang sama dengan negara-negara besar (China, AS, India dan Jepang).*
- *Keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019 - 2020*

Lingkungan internasional/global

- Dominasi perdagangan dan investasi China di Asia dan proyek *Belt and Road Initiative (BRI)* menjadikan hubungan RI - China semakin penting dan strategis.
- Perang Dagang China - AS yang menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global - semangat multilateralisme yang menurun pada AS yang “menular” pada mitra dagangnya.
- China yang semakin asertif di Laut China Selatan dan kontrol de facto negara itu di wilayah perairan tersebut dan munculnya wacana wilayah Indo-Pacific di mana India mewujudkan *Act East Policy*.

- *Deklarasi Poros Maritim Dunia untuk menjaga keutuhan wilayah perairan NKRI dan kepentingan strategis di dalamnya - penamaan Luat Natuna Utara dan pembangunan insfrastruktur militer di Kepulauan Natuna.*
- *Jokowi cenderung melihat ASEAN sebagai ajang persaingan dagang dan investasi antara Indonesia dan anggota yang lainnya terutama memanfaatkan pasar China sehingga kepentingan real RI menjadi dasar kebijakan regionalnya.*

Catatan Penting Untuk Pemerintahan Yang Baru Dalam Masa Transisi

- Pasca 2014 Indonesia akan menghadapi berbagai ketidakpastian di tingkat global dan regional dan pemerintahan yang baru perlu secara cerdas menyikapi ketidakpastian tersebut demi kepentingan nasional.
- Warisan yang perlu diapresiasi dari pemerintahan SBY adalah kombinasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam kerangka demokrasi berbasis sistem presidensial multiparty yang menjamin stabilitas politik. Ini menjadi identitas politik Indonesia di dunia internasional.
- ASEAN memang tetap dibutuhkan untuk *bargaining* dengan negara-negara besar, tetapi perlu dipikirkan pencapaian *tangible benefits* dan tidak sekadar menjadi norm setter yang belum tentu dipatuhi. Perlu dipikirkan mana persoalan atau isu yang perlu ditangani secara bilateral dan mana yang regional (*relevant space for decision making*).

- Diplomasi ekonomi sangat penting karena lebih terkait dengan kepentingan Indonesia yang sedang membangun internal strength sebagai basis kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik dalam HI.
- Gagasan Indo-Pacific Treaty oleh Indonesia perlu mendapat dukungan yang penuh dari semua negara anggota ASEAN agar bargaining position menghadapi China dan AS yang semakin kuat.
- Legacies dari pemerintahan SBY disikapi secara kritis karena ada yang perlu diteruskan tapi ada juga yang tidak perlu dilanjutkan.
- Identitas Indonesia sebagai “Asia’s emerging democratic power” perlu dipertahankan bukan dengan managing good impressions tetapi kerja nyata di dalam dan luar negeri.

SBY 2004 - 2014

JOKOWI 2014 - TODAY

An outward-oriented

An inward-looking oriented

Global worldview

A pan-Indo-Pacific worldview

Democratic projection

Maritime projection

Soft power projection

Hard power projection

Multilateral activism

Bilateralism

Normative

Pragmatic and transactional

A liberal institutionalist approach

An interest-driven realist worldview

Beginning of economic diplomacy

Economic diplomacy as a key foreign policy instrument

Balance of interests

Balance of interests

Equilateralism

Equilateralism

Minimal force projection

Assertive force projection

ASEAN-Plus Focus

De-emphasis on ASEAN

Middle power diplomacy

Negara Besar (Great Power) approach

Sumber: Vibanshu Shekar (2018, p. 21)

Referensi:

- Rizal Sukma (1995). “The Evolution of Indonesia’s Foreign Policy: An Indonesian View”. *Asian Survey*, Volume 35 No. 3 (March 1995). pp. 304 - 315.
- Suryadinata, L. (1996). *Indonesia’s foreign policy under Soeharto, aspiring international leadership*. Singapore: Times Academic Press.